

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran atau yang biasa disingkat dengan LRA merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, serta pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan realisasi anggaran disusun dengan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai realisasi serta anggaran yang diterima atau diberikan kepada entitas pelaporan. Realisasi dan anggaran tersebut disandingkan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap target anggaran yang telah disepakati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

2.2 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh entitas pelaporan akan memberikan manfaat bagi entitas tersebut. Manfaat yang didapatkan bersumber dari informasi-informasi yang disediakan dalam laporan realisasi anggaran yaitu informasi mengenai realisasi dari pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, serta pembiayaan yang disandingkan dengan anggarannya.

dalam laporan tersebut menjadi pertimbangan bagi suatu entitas pelaporan dalam memberikan evaluasi terhadap keputusan pengelolaan dan penggunaan anggaran seperti pengalokasian sumber daya ekonomi yang dimilikinya, tingkat akuntabilitas dan ketaatan dari entitas tersebut terhadap anggarannya. Informasi tersebut berguna dalam memberikan evaluasi kinerja dari pemerintah dalam untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari penggunaan anggaran yang ada.

Selain manfaat tersebut di atas, informasi yang ada pada laporan realisasi anggaran dapat dipergunakan dalam memberikan gambaran sumber daya ekonomi sebagai pendanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Hal tersebut dapat diprediksi melalui penyajian laporan secara komparatif. Informasi-informasi yang ada pada laporan realisasi anggaran memberikan manfaat bagi pengguna laporan dalam memperoleh informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang dilaksanakan secara efisien dan efektif, dilaksanakan sesuai penganggarannya, dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan.

2.3 Periode Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran

Setiap entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran paling tidak dilakukan satu kali dalam satu tahun. Namun, laporan realisasi dapat disajikan dalam waktu yang lebih lama atau lebih pendek dari satu tahun. Hal tersebut dapat dilakukan oleh entitas pelaporan apabila menghadapi situasi tertentu. Dalam hal entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi pada periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan harus memberikan keterangan mengenai alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun dan fakta

mengenai laporan realisasi anggaran dengan catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.4 Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran

Informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit serta pembiayaan yang tersaji dalam laporan realisasi anggaran dan diperbandingkan dengan anggarannya harus disajikan atau diidentifikasi secara jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Menurut PSAP 02, dalam mewujudkan laporan realisasi anggaran yang jelas dapat mencantumkan beberapa informasi seperti nama entitas pelaporan atau identifikasi yang lain, cakupan dari entitas pelaporan tersebut, periode yang digunakan dalam laporan realisasi anggaran, jenis mata uang yang digunakan dalam pelaporan, serta satuan angka yang digunakan di dalamnya. Melalui kelengkapan data tersebut, laporan realisasi anggaran akan lebih memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi yang dicari.

Informasi yang disajikan dalam laporan realisasi disusun atau disajikan dengan menonjolkan berbagai unsur di dalamnya untuk menyajikan informasi yang wajar yang menyandingkan realisasi dengan anggaran dari unsur tersebut. Penjelasan terkait laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut pada Catatan atas Laporan Keuangan atau CaLK. CaLK laporan realisasi anggaran menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi adanya perubahan atau kebijakan tertentu dalam pelaksanaan anggaran diantaranya seperti kebijakan fiskal dan moneter, alasan terjadinya perbedaan pada anggaran dan realisasinya, serta menjelaskan lebih lanjut terkait angka atau nominal yang ada pada laporan realisasi anggaran.

2.5 Akuntansi Pendapatan – LRA

Salah satu informasi yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran yaitu informasi mengenai pendapatan dari suatu entitas pelaporan. Pendapatan dalam laporan realisasi anggaran diakui ketika pendapatan tersebut diterima pada rekening kas umum negara/daerah (RKUN/D). Pendapatan pada laporan realisasi anggaran menurut PSAP 02 diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatan. Pelaksanaan dari akuntansi pendapatan didasarkan pada asas bruto. Asas bruto yaitu pembukuan penerimaan secara bruto tanpa mencatat penerimaan secara neto.

Sedangkan pendapatan pada badan layanan umum (BLU), pendapatan diakui dengan menggunakan peraturan BLU yang diterapkan oleh masing-masing BLU. Pengembalian akan dibukukan sebagai pengurang pendapatan apabila pengembalian penerimaan pendapatan bersifat normal dan berulang. Pengembalian yang sifatnya tidak berulang akan dibukukan sebagai pengurang pada pendapatan periode yang sama.

2.6 Akuntansi Belanja

Belanja dibedakan berdasarkan jenis belanjanya, organisasi dan fungsi. Belanja yang dibedakan berdasarkan jenis belanjanya atau klasifikasi ekonomi merupakan jenis belanja yang dikelompokkan berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas sebuah entitas. Belanja pemerintah pusat yang termasuk pada klasifikasi ekonomi yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Kemudian, belanja operasi merupakan belanja yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan untuk kegiatan harian baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah dalam jangka waktu yang pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja barang, belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, serta bantuan sosial.

Komponen belanja yang berikutnya yaitu belanja modal. Belanja modal diartikan sebagai sebuah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mendapatkan aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, aset tersebut adalah aset tetap dan aset lainnya. Belanja yang termasuk dalam belanja modal diantaranya yaitu belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.

Selain ketiga belanja tersebut, terdapat belanja lain-lain atau tak terduga yang merupakan pengeluaran anggaran oleh penyelenggara kewenangan pemerintah pusat/daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diinginkan untuk terjadi kembali seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

Kebijakan akuntansi belanja adalah mengakui belanja ketika pengeluaran terjadi yang berasal dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah. Apabila pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan pengeluaran akan dilakukan ketika unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan melakukan pengesahan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut.

Beberapa contoh belanja menurut ekonomi atau jenis belanja yaitu :

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari beberapa belanja diantaranya yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, serta Belanja Bantuan Sosial.

2) Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Aset Tetap dan Belanja Aset Lainnya dimana aset lainnya tersebut merupakan belanja yang tidak tergolong dalam Belanja Aset Tetap.

3) Belanja Lain-lain/Tak Terduga

Klasifikasi berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan organisasi. Klasifikasi tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkup pemerintah pusat dan daerah memiliki perbedaan. Pada lingkup pemerintah pusat, belanja menurut organisasi terdiri atas belanja per kementerian/Lembaga dan unit yang berada dibawahnya. sedangkan belanja menurut organisasi pada lingkup pemerintah daerah terdiri atas :

1) Belanja Sekretariat DPRD

2) Belanja Sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota

3) Belanja Dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota

4) Belanja Lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota

Klasifikasi belanja yang berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan fungsinya. Klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan fungsi dari pemerintah pusat maupun

daerah dalam hal memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Contoh dari klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari berbagai macam belanja diantaranya yaitu terdapat Belanja Agama, Belanja Ekonomi, Belanja Ketertiban dan Keamanan, Belanja Kesehatan, Belanja Pelayanan Umum, Belanja Pendidikan, Belanja Pariwisata dan Budaya, Belanja Perlindungan Lingkungan Hidup, Belanja Pertahanan, Belanja Perumahan dan Permukiman, serta Belanja Perlindungan sosial

Realisasi dari anggaran belanja dari suatu entitas dilaporkan sesuai dengan penggunaan klasifikasi pada dokumen anggaran setiap entitas. Penerapan akuntansi belanja pada sebuah entitas disusun untuk keperluan pertanggungjawaban entitas bersangkutan dan dapat dikembangkan sebagai sarana pengendalian bagi manajemen entitas tersebut melalui pengukuran kegiatan belanja yang dilakukan.